

Pentahelix Collaborative Governance in Handling the Spread of Covid-19 Through the Tangguh Village Program (Case Study in Tangguh Village, Cangkringan Hamlet, Cangkringsari Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency)
[Collaborative Governance Pentahelix Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 Melalui Program Kampung Tangguh] (Study Kasus di Kampung Tangguh Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

M Dodik Kurniawan¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi : hendrasukmana@umsida.ac.id

Abstract. Efforts to deal with the spread of the COVID-19 pandemic are urgently needed, especially in dealing with the problems that arise. This study uses a qualitative method. Research informants namely: 1). from the Government Sector (Plt) of the Regent of Sidoarjo, namely Mr. Nur Achmad (Alm) and (PJ) Head of Cangkringsari Village, namely Mr. Suhut. 2). from the Business Sector, namely Mrs. Farida (Coordinator of Basnaz Kec. Sukodono) 3) from the Academic Sector, namely Mas Niko and Ms. Maryama (KKN Uinsa and Unesa 2020). 4) from the Community, the Head of RW 03 as the Chief Executive of Kampung Tangguh, Dusun Cangkringan, namely Mr. Dini Purnawansyah. 5). from the Media Sector Ms. Vega and Ms. Sella (Radar Newspaper and Content Creator). Collecting data using interviews, observation and documentation. This research aims to elaborate on the roles of stakeholders in responding to the COVID-19 pandemic, looking at the context of the Tangguh Village Program. Using the theory of government collaboration from Ansell and Gash and the concept of the Pentahelix model, this study argues that the key to the success of the Tangguh Village Program in Cangkringan Hamlet, Cangkringsari Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency is the result of collective awareness in the form of bottom up participation or a form of community participation. and the government in dealing with the COVID-19 pandemic.

Keywords - Pandemic, Collaboration, Tangguh Village

Abstrak. Upaya dalam penanganan penyebaran pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani permasalahan-permasalahan yang muncul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian yaitu: 1). dari Sektor Pemerintah (Plt) Bupati Sidoarjo yaitu Bapak Nur Achmad(Alm) dan (PJ)Kepala Desa Cangkringsari yaitu Bapak Suhut. 2). dari Sektor Bisnis yaitu Ibu Farida (Koordinator Basnaz Kec.Sukodono) 3) dari Sektor Akademisi yaitu Mas Niko dan Mbak Maryama (KKN Uinsa dan Unesa 2020). 4) dari Komunitas Masyarakat Ketua RW 03 selaku Ketua Pelaksana Kampung Tangguh Dusun Cangkringan yaitu Bapak Dini Purnawansyah. 5).dari Sektor Media mbak Vega dan mbak Sella (Koran Radar dan Conten Creator). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi peran antar stakeholder dalam merespon pandemi COVID-19, melihat konteks Program Kampung Tangguh. Menggunakan teori kolaborasi goverment dari Ansell dan Gash dan konsep model pentahelix, penelitian ini berargumen bahwa kunci kesuksesan berjalannya Program Kampung Tangguh di Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ini merupakan hasil kesadaran kolektif berupa partisipasi dari bawah (bottom up participation) atau bentuk partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Kata Kunci - Pandemi, Kolaborasi, Kampung Tangguh

I. PENDAHULUAN

Pada bulan Desember di tahun 2019, dunia dikejutkan dengan mewabahnya penyakit *pneumonia* baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Masalahnya virus ini telah berhasil menginfeksi ribuan juta masyarakat global dalam waktu yang sangat singkat (Li et al, 2020). Bahkan manusia tanpa menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 dapat pula menyebarkan kepada manusia lainnya (Kumar & Dwivedi, 2020). Virus ini akhirnya berkembang dan menjadi pandemi yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Pada tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dalam jurnal yang berjudul *Epidemiological Characteristics of Early COVID-19 Case Outbreaks in Indonesia* dijelaskan pada tanggal 31 Maret 2020 bahwa 200 negara dari seluruh wilayah dunia (Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Oseania) mengonfirmasi populasi negara-negara ini terinfeksi COVID-19.

Di Indonesia baru disadari oleh masyarakat seiring dengan pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui media pada tanggal 2 Maret 2020 tentang dua warga negara Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19. Dalam pengumuman tersebut Presiden menjelaskan bahwa munculnya kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi karena adanya pembawa virus, sehingga akan menyebabkan terpaparnya orang yang melakukan kontak dengan pembawa tersebut. Namun terdapat waktu inkubasi selama 2 – 14 hari yang dapat digunakan untuk melihat apakah orang tersebut tertular atau tidak. Apabila orang tersebut masuk kategori positif, maka perlu dilakukan perlakuan dan perawatan secara khusus agar tidak menyebarkan virus ke orang lain. Kecepatan penularan COVID-19 juga tergantung dari banyaknya kontak orang yang kemungkinan positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media penular lainnya atau di wilayahnya. Apabila ini tidak segera ditangani maka akan terjadi lonjakan kasus orang yang tertular bahkan kasus yang positif.

Berikut ini adalah perkembangan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia dari bulan Maret pada tahun 2020 sampai bulan Agustus pada tahun 2021.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Kasus Positif COVID-19 di Indonesia

TAHUN	JUMLAH
2020	743.198
2021	3.440.396

Sumber : Data diolah dari Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan pada tabel 1 di atas perkembangan penyebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 hingga bulan Agustus tahun 2021 mencapai 3.440.396 kasus. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Berikut perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2
Perkembangan Jumlah Kasus Positif COVID-19 di provinsi Jawa Timur

TAHUN	JUMLAH
2020	84.152
2021	312.103

Sumber : Data diolah dari Kementerian Kesehatan RI

Tabel 2 menyajikan data kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebanyak 84.152 kasus positif dan pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Agustus sebanyak 312.103 yang terkonfirmasi kasus positif.

Tabel 3
Perkembangan Jumlah Kasus Positif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo

TAHUN	JUMLAH
2020	7.980
2021	21.005

Sumber : Data diolah dari Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui pada tahun 2020 sebanyak 7.980 kasus positif dan pada tahun 2021 terhitung dari bulan januari sampai bulan agustus sebanyak 21.005 yang terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Dan itu menandakan setiap hari jumlah kasus positif semakin banyak dan tak bisa diperkirakan sampai kapan ini berakhir.

Penyebaran virus yang sangat pesat membawa dampak pada banyak aspek kehidupan manusia di dunia. Setiap individu dituntut atau bahkan dipaksa untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan kondisi baru yaitu konsep yang tengah berjalan ini. Dalam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia, maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo. Perubahan dari Perbup Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sidoarjo menjadi Perbup Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2020 karena pada peraturan sebelumnya berisi tentang pedoman PSBB pada umumnya, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir serta aturan terkait protokol kesehatan. Berlandaskan dalam Perbup Sidoarjo No. 39 Tahun 2020 tersebut diatas, maka wilayah pemerintahan desa/kelurahan dihimbau untuk melakukan pembentukan kampung tangguh secara selektif dan atas dasar inisiatif dari RT/RW/dusun/lingkungan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan. Ketetapan mengenai area kampung tangguh dapat di mana saja selama berada dalam satu lingkup wilayah desa/ kelurahan.

Kebijakan yang baik saja tidak cukup dalam upaya menangani Covid-19 di negeri ini. Selain itu, dibutuhkan adanya komitmen masyarakat untuk mematuhi segala aturan dan kebijakan pemerintah serta kerja sama antar *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam mewujudkan kekuatan dan pertahanan dalam menghadapi pandemi utamanya di Indonesia. Wujud kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melauai Program Kampung Tangguh untuk mendisiplinkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Dengan adanya implementasi melalui kolaborasi diharapkan masyarakat nantinya mampu menghadapi permasalahan secara lebih mandiri pada permasalahan yang terjadi secara dinamis sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat diwujudkan.

Model kolaborasi *pentahelix* dianggap paling mumpuni untuk diimplementasikan dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Doni Monardo selaku Ketua Satgas COVID- 19 yaitu, kolaborasi model *pentahelix* berbasis nilai-nilai kedaerahan atau kearifan lokal dapat dijadikan alternatif untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 (liputan6.com). Dalam kolaborasi model *pentahelix* terdapat lima unsur yang harus ada yaitu, pemerintah, pebisnis, komunitas masyarakat, akademisi dan juga media. Kolaborasi model *pentahelix* dipercaya dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara lebih cepat sehingga tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pada saat atau pasca terjadinya bencana (Rizkiyah dkk, 2019:249).

Desa merupakan objek yang memiliki peran begitu penting karena desa atau kampung sebagai benteng pertahanan terakhir dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan desa memiliki peluang yang sangat besar dalam hal mendisiplinkan masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Dengan kondisi semacam ini masyarakat memiliki tuntutan untuk tetap memenuhi kebutuhan dengan bekerja secara mandiri memanfaatkan sumber daya yang ada. Program kampung tangguh ini berbasis komunitas warga dan melibatkan semua warga tanpa terkecuali dalam pelaksanaan program ini. Bahkan kampung tangguh yang berbasis *problem solving* di jadikan sebagai upaya pemecahan masalah di tengah terjadinya virus corona. Kampung tangguh bukan hanya tangguh untuk memerangi virus corona tapi juga tangguh dalam bidang ekonomi, keamanan dan kebutuhan pangan.

Desa Cangkringsari adalah Desa yang berada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Sebelum adanya kebijakan tentang PSBB dan Kampung Tangguh salah satu Dusun di Desa Cangkringsari yakni Dusun Cangkringan telah melakukan upaya penanganan COVID-19 atas dasar inisiatif warga. Upaya sebagai langkah inisiatif yang dilakukan, meliputi pendirian posko, penjagaan 24 jam dan sosialisasi agar warga taat protokol kesehatan serta menyediakan lumbung pangan untuk warga terutama bagi warga yang terdampak COVID-19 dan warga tidak mampu. Hal ini merupakan perwujudan adanya aktivitas masyarakat yang berupa modal sosial yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dengan tercipta hubungan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Melihat permasalahan-permasalahan diatas kolaborasi yang terjadi diantara para aktor tersebut belum optimal, Sehingga perlu adanya peran partisipasi aktif antar aktor dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses kolaborasi dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dengan judul “ *Collaborative Governance Pentahelix dalam penanganan penyebaran Covid-19 melalui program Kampung Tangguh (Studi kasus Kampung Tangguh di Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*”.

II. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, Menurut (Kuswana, 2011) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang penelitiannya berusaha memahami masalah-masalah sosial berdasarkan dengan fakta yang didapatkan di lapangan. Setelah itu dilakukan suatu analisis atau telaah agar dapat memperoleh suatu gambaran atau hasil yang jelas dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya berdasarkan observasi langsung. Lokasi penelitian ini adalah di Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Informan dalam penelitian ini antara lain: 1). dari Sektor Pemerintah (Plt) Bupati Sidoarjo yaitu Bapak Nur Achmad(Alm) dan (PJ)Kepala Desa Cangkringsari yaitu Bapak Suhut. 2). dari Sektor Bisnis yaitu Ibu Farida (Koordinator Basnaz Kec.Sukodono) 3) dari Sektor Akademisi yaitu Mas Niko dan Mbak Maryama (KKN Uinsa dan Unesa 2020). 4) dari Komunitas Masyarakat Ketua RW 03 selaku Ketua Pelaksana Kampung Tangguh Dusun Cangkringan yaitu Bapak Dini Purnawansyah. 5).dari Sektor Media mbak Vega dan mbak Sella (Koran Radar dan Conten Creator). Teknik pengumpulan data informasi secara kualitatif yaitu dari data primer dan sekunder. Yang mana data primer atau langsung didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur baik dari buku, jurnal, catatan, kata-kata, gambar maupun tulisan pada saat melakukan penelitian. Teknik analisis data dengan menggunakan *interactive model* meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ialah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian berlangsung atau dilakukan serta untuk mendapatkan sumber informasi ataupun data yang dicari berkenaan dengan rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan di Kampung Tangguh Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini, karena melihat adanya bentuk upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam penanganan penyebaran *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* melalui program kampung tangguh di Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti akan melakukan pembahasan dibagian ini yang akan dikaji secara teoritik berdasarkan pada teori yang disusun oleh Ansell and Gash (dalam buku Islamy, 2018:12) memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitator leadership* (kepemimpinan fasilitator), *Collaborative process* (proses kolaborasi).

Model kolaborasi yang paling ideal adalah kolaborasi model *pentahelix*, yang juga sesuai dengan arahan Dini purnawansyah selaku Ketua Kampung Tangguh Dusun Cangkringan. Salah satu dampak positif pengimplementasian kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan wabah COVID-19 adalah adanya pelibatan berbagai unsur seperti komunitas masyarakat. Adanya komunitas masyarakat dapat menjadi akselerator dari tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena komunitas masyarakat dapat mempercepat penyampaian program terkait upaya penanganan wabah COVID-19, sehingga akan mampu membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah yang sedang terjadi,

serta patuh pada dan turut serta menyukseskan program yang telah dikeluarkan pemerintah. Selaras dengan S Halibas dkk, (2017:162) yang memaparkan bahwa kolaborasi *pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan bersama.

Kondisi Awal

Beberapa kegiatan atau keadaan mampu membentuk situasi mengapa sebuah kolaborasi harus dilakukan, sebelum ditentukannya proses kolaborasi. Keadaan seperti ini disebut sebagai kondisi awal. Menurut teori dasar pada penelitian ini yang mengacu pada model *collaborative governance* oleh Ansel & Gash (dalam buku Islamy, 2018:12) variabel kondisi awal meliputi tiga faktor yaitu ketidakseimbangan sumber daya, sejarah masa lalu, dan insentif.

Inisiatif pertama, dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di Dusun Cangkringan bermula dari dituliskannya surat tertanggal 31 Maret 2020 oleh Ketua RW 03 Dusun Cangkringan yakni Dini Purwansyah. Surat tersebut ditujukan kepada Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Cangkringsari dengan Nomor surat 01/RW-03/CS/III/2020. Isi surat tersebut tentang permohonan agar segera dilakukannya langkah-langkah nyata yang tepat, cepat, dan terukur terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di wilayah Desa Cangkringsari oleh PJ Kepala Desa Cangkringsari. Inisiatif selanjutnya adalah dibuatnya Surat Edaran Nomor: 001/ SE/ RW- 03/ IV/ 2020 oleh Ketua RW 03 Dusun Cangkringan yang dibagikan kepada seluruh warga Dusun Cangkringan. Surat edaran tersebut berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. *Mulai Hari Selasa, tanggal 07 April 2020 akan diadakan penjagaan 24 jam di pintu masuk Dusun Cangkringan;*
2. *Siapapun yang hendak memasuki wilayah Dusun Cangkringan, diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan;*
3. *Jadwal penjagaan dibagi menjadi 4 (empat);*
4. *Penjagaan 24 jam berlangsung selama masa darurat masih belum dicabut oleh Pemerintah;*
5. *Selama masa darurat ini, kami mohon kesediaan seluruh warga untuk memberikan sebagian rizkinya berupa uang Rp. 1.000,- per hari untuk setiap rumah yang akan berlaku mulai Tanggal 10 April 2020. Uang tersebut akan kami gunakan untuk biaya operasional penjagaan 24 jam, kelengkapan sarana cuci tangan, dan penyemprotan cairan desinfektan bagi kendaraan yang melintas di pos penjagaan;*
6. *Kami segenap pengurus RW 03 dan pengurus RT. 10, 11, dan 12 serta Kepala Dusun Cangkringan, akan membagikan masker kain secara gratis kepada seluruh warga Dusun Cangkringan;*
7. *Ketika masker gratis sudah kami bagikan, maka seluruh warga Dusun Cangkringan yang akan keluar dan masuk ke wilayah Dusun Cangkringan wajib memakai masker/sejenisnya;*
8. *Bagi seluruh warga Dusun Cangkringan agar mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak begitu penting, dan apabila terpaksa dianjurkan untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak aman antar orang sejauh minimal 1 meter;*
9. *Bagi setiap orang luar tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Dusun Cangkringan, kecuali terdapat keperluan yang sangat penting dan mendesak;*
10. *Hal-hal yang belum diatur di dalam surat edaran ini, akan diatur lebih lanjut dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari seluruh warga yang disampaikan melalui ketua RT masing-masing*





Gambar 1 Posko Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Dusun Cangkringan

Gambar tersebut merupakan potret Posko Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang didirikan oleh warga Dusun Cangkringan atas dasar inisiatif warga setempat. Penjagaan di Posko dilakukan setiap hari oleh tim relawan yang merupakan warga Dusun Cangkringan selama 24 jam sebagaimana yang tertulis pada surat edaran ketua RW 03 Dusun Cangkringan.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan adalah variabel kedua dalam *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (dalam buku Islamy, 2018:12) desain kelembagaan mengacu pada aturan- aturan dasar dan kelembagaan yang mengatur proses *collaborative governance* sehingga program dapat berjalan dengan konsisten dan bersifat adil serta terbuka. Selain itu, Sudarmo (2011:115) mengatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan dari *collaborative governance* adalah desain kelembagaan yang jelas dimana adanya kepastian dan kejelasan mengenai penyelenggara program *collaborative governance* dan aturan-aturan yang mendasari jalannya program.

Aturan dasar yang mengatur setiap proses kolaborasi pada program kampung tangguh tetuang di Perbup Sidoarjo No. 39 Tahun 2020 terdapat 1 (satu) bab yakni Bab VA tentang Kampung Tangguh, berikut ini penjelasan Pasal 19A:

1. Pemerintah Desa/ Kelurahan membentuk kampung tangguh diwilayahnya.
2. Pembentukan kampung tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara selektif dengan mengedepankan keswadayaan masyarakat serta diprioritaskan terhadap desa/ kelurahan yang berstatus zona merah, dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019(COVID-19). Pembentukan kampung tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
3. dilakukan atas inisiatif dari RT/RW/dusun/lingkungan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
4. Area kampung tangguh dapat menggunakan desa/kelurahan/dusun/ lingkungan/RT/RW sesuai tingkat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Dengan penetapan sebagai kampung tangguh, Pemerintah desa/ kelurahan wajib memenuhi:
 - (a)Penyediaan alat dan prasarana, (b)personel, (c)Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Oleh karena inisiatif upaya tersebut, Dusun Cangkringan kemudian ditunjuk dan ditetapkan sebagai kampung tangguh dengan dibuat dan ditetapkannya SK Kepala Desa Cangkringsari Nomor: 188/14/438.7.10.08/2020. SK tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2020 yang menetapkan bahwa RW 03 Dusun Cangkringan sebagai Kampung Tangguh dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono.

Pada tanggal 27 Juni 2020 diadakan acara *launching* dimana Dusun Cangkringan diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Kampung Tangguh oleh Wakil Bupati Sidoarjo. Acara *launching* tersebut adalah acara peresmian kampung tangguh untuk seluruh kampung tangguh di wilayah Kecamatan Sukodono. Lokasi *launching* berada di Kampung Tangguh Dusun Cangkringan.



Gambar 2 Lounching Kampung Tangguh di Dusun Cangkringan yang diresmikan oleh PIt.Bupati Sidoarjo (Alm.Nur ahmad)

Kepemimpinan Fasilitator

Proses kepemimpinan langsung dikoordinasikan oleh Ketua Koordinator Warga Kampung Tangguh yang dibina langsung oleh Kepala Desa Cangkringsari. Bentuk kepemimpinan yang dijalankan pada program ini adalah kepemimpinan fasilitatif dimana program *collaborative governance* dimaksudkan untuk memberi manfaat untuk banyak pihak khususnya masyarakat untuk keberhasilan Program Kampung Tangguh.

Berdasarkan model *collaborative governance* oleh Ansel & Gash (dalam Islamy, 2018:13) kepemimpinan fasilitatif memegang peranan penting dalam proses *collaborative governance*. Hal ini juga disampaikan oleh Nawawi (2013) yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah bentuk koordinasi dari semua sumber daya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Pada pelaksanaan Kampung Tangguh dalam program *collaborative governance*, bentuk realisasi kepemimpinan fasilitatif dilakukan dengan memberikan manfaat sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mobilitas serta faktor-faktor lain yang dapat menghambat penyebaran Covid-19. Selain itu, Ketua Koordinator Kampung Tangguh juga bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di kampung tangguh dan mengkomando seluruh pengurus di struktural untuk memastikan seluruh SOP kampung tangguh dijalankan juga SOP pada saat kejadian COVID 19 dijalankan dengan baik.

Proses Kolaborasi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Ketua Koordinator Kampung Tangguh bersama dengan Pemerintah Cangkringsari telah berkolaborasi dengan pihak PemKab.Sidoarjo. Sedangkan dari pihak internal Desa tentunya juga ada diantaranya anggota Relawan, Organisasi Kepemudaan, serta masyarakat Dusun Cangkringana guna menyukseskan jalannya Program Kampung Tangguh dalam menanggulangi Covid- 19.

Proses kolaborasi dilakukan secara langsung oleh Ketua Koordinator Kampung Tangguh beserta Kepala Dusun yang kemudian menginformasikan secara langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi ke warga yang melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat guna menginformasikan segala informasi berkaitan dengan program kampung tangguh, Adapun potretnya sebagai berikut:



Gambar 3 Sosialisasi ke warga yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat

Ketua Koordinator Kampung Tangguh, beserta kepengurusan Organisasi Kampung Tangguh dan Bhabinkamtibmas berusaha setiap saat mengadakan pertemuan dan dialog tatap muka untuk mengajak masyarakat peduli dan aktif terhadap program kampung tangguh, dalam program ini setiap bulan dan setiap minggu itu ada evaluasi serta juga ada pertemuan menyangkut masalah perkembangan penyebaran Covid-19 di Dusun Cangkringani, selalu ada upaya-upaya untuk masyarakat tetap berperan seperti berolahraga teratur dan masyarakat juga menjadi lebih bersih dan sehat karna menggunakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).

Adanya dialog tatap muka antara Pemerintah Desa Cangkringsari, ketua koordinatoo kampung tangguh dan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat yang telah dijalankan dalam program kampung tangguh, hal ini sesuai dengan penelitian Edelenbos (2005) dimana dialog tatap muka menjadi sarana dalam proses kolaborasi guna menginformasikan atau memaparkan segala bentuk kebijakan, pengambilan keputusan, dan aktivitas yang akan diseleggarakan pada program *collaborative governance*. Selain itu, aktivitas dialog tatap muka juga disebutkan oleh Ansell and Gash (dalam buku Islamy, 2018:12) sebagai proses yang bertujuan mencapai konsensus atau kesepakatan bersama sehingga penting dalam proses kolaborasi.

Ketua RW 03 Dusun Cangkringana pada sebuah berita yang tayang pada sebuah aplikasi video *streaming*, yaitu 'Video' dengan judul tayangannya adalah Ketahanan Pangan di Kampung Tangguh Cangkringana, yang kemudian sebagian ditayangkan pada berita televisi, yakni Fokus Indosiar. Pada laman video tersebut Dini Purnawansyah salah seorang warga Dusun Cangkringana yang sekaligus sebagai Ketua

RW 03 menjelaskan bahwa Posko Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Kampung Tangguh telah didirikan sejak tanggal 7 April 2020.

Pada pertengahan bulan Mei 2020 secara efektif kampung tangguh di Dusun Cangkringan telah berjalan. Persiapan ketahanan pangan sebagai upayaantisipasi kelangkaan pangan selama pandemi COVID-19, maka dibangun lumbung pangan dengan menghimpun hasil panen padi para petani padi warga setempat. Selain itu disiapkan juga lahan marginal untuk dimanfaatkan warga agar ditanam sayur, buah, dan juga dipergunakan untuk kolam budidaya ikan lele. Adapun potretnya sebagai berikut:



Gambar 4 Ketahanan Pangan Kolam ikan Lele dan Lahan sayur-sayuran

Pada media publikasi, yakni Koran Radar Sidoarjo edisi tanggal 17 Juli 2020 dijelaskan bahwa Kampung Tangguh Dusun Cangkringan telah melaksanakan penjagaan Posko Kampung Tangguh dengan ketat selama 24 jam. Ketua RW 03 Dusun Cangkringan telah melakukan upaya sosialisasi kepada warga terkait tindakan yang harus dilakukan apabila terdapat warga yang terjangkit COVID-19 agar bisa ditangani bersama-sama. Selain itu juga kesiapan lumbung pangan di Dusun Cangkringan yang berupa beras yang dihimpun dari hasil panen warga setempat, budidaya ikan lele, dan tanaman sayur-sayuran yang semua itu dilakukan oleh tim relawan. Lumbung pangan dikelola secara mandiri merupakan langkah antisipasi jika terjadi krisis pangan akibat pandemi COVID-19.

Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Ciptakan Lumbung Pangan untuk Warga

SUKODONO- Pemerintah Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono terus memantau posko kampung tangguh selama 24 jam. Hal itu sebagai bentuk upaya mencegah penyebaran Covid-19 yang masih terjadi di wilayah Sidoarjo.

Ketua RW 03 Dusun Cangkringan Desa Cang-

kringsari, Dini Purnawansyah menuturkan, seluruh warga yang keluar masuk ke wilayah Cangkringsari diminta untuk turun dari kendaraannya. Selanjutnya diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu di posko kampung tangguh.

"Mereka juga wajib menggunakan masker, itu salah satu upaya kami dalam mengawasi masya-

rakat yang keluar masuk," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tindakan ketika ada tetangganya yang berstatus ODP, PDP atau bahkan terkonfirmasi Covid-19. Hal itu dinilai penting agar tanggung jawab warga dapat dilakukan secara bersama-sama.

Sementara untuk menciptakan ketahanan pangan, pihaknya juga membentuk lumbung pangan. Hasil panen warga sekitar dihimpun untuk disalurkan kepada warga seandainya krisis pangan. Lumbung pangan itu juga diwujudkan dengan budidaya pepaya California.

"Ada pula penanaman sayur oleh tim relawan, perberdayaan ibu-ibu hingga pembuatan produk bahan olahan pepaya," jelasnya. (far/nis)



KOMPAK: Ketua RW 03 Dusun Cangkringan Dini Purnawansyah (kiri) saat memantau posko kampung tangguh.

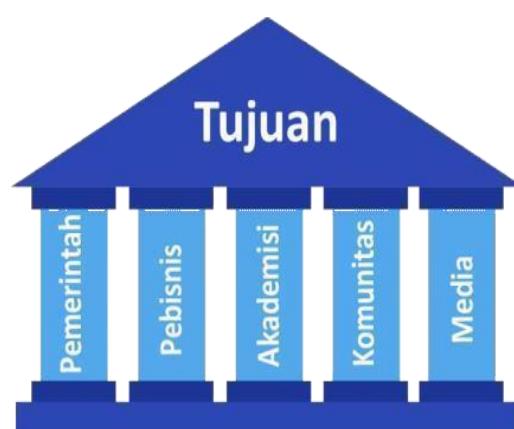
Gambar 5 Sumber : Koran Radar Sidoarjo edisi tanggal 17 Juli 2020

Hal ini merupakan perwujudan adanya aktivitas masyarakat yang berupa kesadaran sosial yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dengan tercipta hubungan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.

Ada berbagai model kolaborasi yang dapat digunakan, namun saat ini yang paling ideal adalah kolaborasi model *pentahelix*, yang juga sesuai dengan arahan Dini purnawansyah selaku Ketua Kampung

Tangguh Dusun Cangkringan. Salah satu dampak positif pengimplementasian kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan wabah COVID-19 adalah adanya pelibatan berbagai unsur seperti komunitas masyarakat. Adanya komunitas masyarakat dapat menjadi akselerator dari tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena komunitas masyarakat dapat mempercepat penyampaian program terkait upaya penanganan wabah COVID-19, sehingga akan mampu membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah yang sedang terjadi, serta patuh pada dan turut serta menyukseskan program yang telah dikeluarkan pemerintah. Selaras dengan S Halibas dkk, (2017:162) yang memaparkan bahwa kolaborasi *pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan bersama.

Menurut Aribowo (2018:33) kolaborasi model *pentahelix* adalah acuan pengembangan kerjasama antar instansi guna mencapai tujuan yang ditargetkan. Setiap unsur memiliki fungsi masing-masing dimana dari fungsi tersebut akan menciptakan interkasi kolaborasi. Unsur pertama adalah pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, koordinator dan kontroler. Unsur kedua adalah pebisnis berfungsi sebagai penyedia infrastruktur, pengembang SDM serta menyokong sarana prasarana hingga pendanaan. Unsur ketiga adalah komunitas, berfungsi sebagai akselerator, atau penghubung antara masyarakat kepada pemangku kepentingan. Unsur keempat adalah akademisi, berfungsi sebagai pengonsep. Unsur kelima adalah media, berfungsi sebagai aktor yang mendukung publikasi atas tujuan yang ingin dicapai.



Gambar 6

Skema Kolaborasi Model *Pentahelix*

Sumber: Olahan Peneliti

Selanjutnya pada tataran implementasi program dan kebijakan terdapat berbagai aktor yang dilibatkan. Setiap unsur memiliki aktor dari berbagai kalangan seperti, unsur pemerintah aktornya bisa dari kalangan birokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif atau lembaga peradilan. Unsur akademisi dapat dari kalangan guru, mahasiswa atau peneliti. Unsur bisnis bisa dari sektor industri, perbankan atau konsumers. Unsur komunitas masyarakat dapat berasal dari kelompok penekan atau organisasi

Identifikasi Sampel Aktor yang Terlibat

Aktor-aktor yang terlibat dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19 di Kampung Tangguh Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari melalui model *pentahelix* pastinya memiliki tujuan yang sama. Baik dari unsur pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas masyarakat dan media saling berkolaborasi agar wabah COVID-19 bisa ditangani dengan baik.

Untuk menentukan sampel aktor yang terlibat dari setiap unsurnya, terlebih dahulu ditentukan aktor dari unsur pemerintah yang selanjutnya dilakukan penggalan melalui metode wawancara. Penentuan ini didasari dari indikator fungsi unsur pemerintah dalam teori kolaborasi model *pentahelix* yang meliputi, koordinator, regulator dan kontroler. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa, Pemkab Sidoarjo dan Pemdes Cangkringsari memiliki peran sentral dan menjadi *leading* dalam upaya penanganannya. Sehingga untuk menentukan keempat unsur lain dan aktornya didasari dari hasil wawancara kedua instansi tersebut. Berikut adalah narasumber dari Pemkab Sidoarjo dan Pemdes Cangkringsari.

Tabel 4
Narasumber Dari Unsur Pemerintah

Instansi	Narasumber	Jabatan
Pemda Kabupaten Sidoarjo	(Alm) Nur Ahmad (Plt) Bupati Sidoarjo	(Plt) Bupati Sidoarjo
Pemdes Cangkringsari	Suhut	(PJ) Kepala Desa Cangkringsari

Sumber: Olahan Peneliti

Hasil wawancara dengan kedua narasumber dari unsur pemerintah tersebut diketahui bahwa, dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19 di Kampung Tangguh Dusun Cangkringan Desa Cangkringsari memang diupayakan mengimplementasikan kolaborasi model *pentahelix*. Dijelaskan bahwa, dengan pendekatan model kolaborasi tersebut akan mampu menambah efektifitas upaya penanganan yang dilakukan. Kolaborasi juga dilakukan dengan instansi pemerintah/SKPD lain, karena pada dasarnya semua instansi di lingkungan pemerintah daerah wajib melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki mulai dari sarana prasarana, personil hingga anggaran dalam menangani wabah COVID-19. Dari wawancara yang dilakukan baik narasumber yang mewakili PemKab.Sidoarjo atau Pemdes Cangkringsari menyebutkan beberapa aktor dari keempat unsur lain (akdemisi, pebisnis, komunitas masyarakat, media), kemudian dari beberapa opsi tersebut peneliti menentukan satu aktor dari tiap unsur sebagai sampel untuk kemudian dilakukan penggalian data melalui wawancara. Berikut aktor yang peneliti pilih sebagai narasumber.

Tabel 5
Identifikasi Narasumber

Unsur	Narasumber	Jabatan/Posisi
Akademisi	Niko Dwi	KKN Uinsa 2020
	Maryama	KKN Unesa 2020
Bisnis	Farida	Koordinator Basnas Kec.Sukodono
Komunitas Masyarakat	Dini Purnawansyah	Ketua Kampung Tangguh
Media	Vega	Wartawan Surat Kabar Radar Sidoarjo
	Sella	Conten Creator Bangsa Sidoarjo

Sumber: Olahan Peneliti

Fungsi Unsur yang Terlibat Unsur Pemerintah

Unsur pemerintah pada dasarnya menjadi unsur yang paling bertanggung jawab dalam implementasi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah, begitupun juga dalam seluruh program dan kebijakan terkait penanganan wabah COVID-19 di Kab.Sidoarjo. Unsur pemerintah mempunyai wewenang yang besar dan sepenuhnya memegang kuasa dalam kebijakan yang diimplementasikan di areanya. Ditinjau dari kolaborasi model *pentahelix* unsur pemerintah memiliki fungsi sebagai koordinator, regulator dan kontroler. Dari hasil penelitian melalui metode wawancara yang dilakukan dengan unsur pemerintah, dalam hal ini Pemkab Sidoarjo dan Pemdes Cangkringsari didapati hasil sebagai berikut: Hasil wawancara dengan Bapak Nur Ahmad (Plt Bupati Sidoarjo) dan Bapak Suhut (PJ Kades Cangkringsari) menunjukkan bahwa, unsur pemerintah telah berupaya melakukan koordinasi dengan keempat unsur lain dalam model *pentahelix*. Bentuk koordinasi berbeda-beda pada setiap unsurnya. Berikutnya dari fungsi regulator, pemerintah telah membuat kebijakan yang memiliki kontribusi secara signifikan dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19." *Kampung Tangguh tidak hanya bermanfaat untuk menekan penyebaran Covid-19 saja. Akan tetapi juga membuat tangguh dari segi keamanan, gotong royong, dan siap siaga di desa-desa. Ada beberapa ketangguhan yang dilakukan para Satgas di Posko Kampung Tangguh. Misal Divisi pemakaman, kesehatan dan pangan, salah satu contoh mengajak warga kompak menangani korban virus Corona. Semua saling peduli dan gotong royong. Satu dengan lainnya bahu-membahu seperti yang dilakukan Danramil 15/Sukodono beserta para Babinsannya guna memberikan semangat dan dorongan kepada warga sehingga terbentuk kapung tangguh di*

beberapa desa diantaranya Ds Cangkringsari saat ini membantu warga terdampak Covid-19, harapannya dapat ditiru warga lainnya. "Pekab Sidoarjo sangat mendukung upaya desa-desa agar segera pulih dari dampak Covid-19. Salah satu paling efektif melalui pembentukan Kampung Tangguh." Selain itu, Cak Nur memperingatkan kembali meski saat ini sudah melewati tahapan PSBB hingga yang ketiga agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Selain itu membiasakan hidup bersih dan sehat. "Supaya Sidoarjo benar-benar terbebas dari virus Corona, Kami berharap beberapa desa di Kecamatan Sukodono yang zona merah dapat segera kembali normal. Warga yang terdampak Covid-19 dapat segera pulih dengan adanya pembentukan Kampung Tangguh ini "

Unsur Akadmisi

Hasil wawancara dengan Mas Niko dan Mbak Maryama (Mahasiswa KKN Uinsa dan Unesa 2020) menunjukkan bahwa, fungsi konseptor masih dilakukan walaupun hanya pada tataran pelaksanaa kegiatan belajar selama pandemi. Dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Kampung Tangguh Dusun Cangkringan kami juga telah turut berkontribusi aktif utamanya dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran mereka akan bahaya wabah COVID-19.

Unsur Bisnis

Hasil wawancara dengan Ibu Farida (Koordinator Basnas Kec.Sukodono) mengatakan bahwa, kami telah berupaya melakukan fungsinya sebagai supporter dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Kampung Tangguh Dusun Cangkringan. Kontribusi yang kami berikan utamanya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pada operasional perusahaan selama masa pandemi. Kami juga pernah memberikan bantuan bahan makanan kewarga sekitar, masker dan vitamin. Semua itu lakukan sebagai bentuk tanggungjawab kami sebagai sektor bisnis yang juga memiliki tanggung jawab sosial.

Unsur Komunitas Masyarakat

Unsur komunitas masyarakat memiliki fungsi sebagai akselerator atau mempercepat tujuan program atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dini (Ketua Koordinator Kampung Tangguh) menyatakan bahwa, dalam upaya penanganan wabah COVID-19 telah turut berkontribusi aktif utamanya dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran mereka akan bahaya wabah COVID-19.

Unsur Media

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Mbak Vega dan Mbak Sella (Wartawan Surat Kabar Radar Sidoarjo dan *content creator* Bangsa Sidoarjo) memperlihatkan bahwa, fungsi publikator telah dilakukan. Narasumber menyatakan bahwa, selalu aktif menginformasikan perkembangan wabah COVID-19 dari awal penyebaran hingga saat ini, khususnya informasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Narasumber juga menyatakan bahwa, informasi yang dikeluarkan akan membuat masyarakat lebih mawas diri dan menjaga kesehatan di masa pandemi. Berita yang dikeluarkan bukan untuk menakuti, namun lebih untuk membuka pikiran pembaca bahwa COVID-19 bukan sesuatu yang dapat diremehkan tetapi juga bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Dalam mengeluarkan pemberitaan terkait COVID-19 diperhatikan juga mengenai dampak psikologis pembaca, oleh karena itu sebisa mungkin untuk menghindari diksi yang ambigu atau diksi yang bersifat hiperbola. Selain itu, Radar Sidoarjo juga selalu berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, untuk melakukan sinkronisasi data, hal itu dilakukan agar berita yang dikeluarkan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Peran media semakin penting sebagai penetralisir ditengah maraknya *hoax* saat ini. Memang belum sepenuhnya dapat memerangi hal tersebut, karena tipe pembaca itu berbeda-beda dan pasti memiliki interpretasi yang berbeda pula dalam menyikapi sebuah informasi. Namun pastinya informasi yang telah dikeluarkan oleh Radar Sidoarjo dan Bangsa Sidoarjo memiliki *impact* entah itu sedikit atau banyak dalam memerangi *hoax*, khususnya mengenai wabah COVID-19.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui status indikator fungsi dari setiap unsur kolaborasi model *pentahelix* sebagai berikut.

Tabel 6
Status Indikator fungsi Kolaborasi *Pentahelix*

Unsur	Sampel Aktor	Fungsi	Status
Pemerintah	Pemkab.Sidoarjo dan Pemdes Cangkringsari	Koordinator	Terimplementasi
		Regulator	Terimplementasi
		Kontroler	Terimplementasi
Bisnis	Basnas Kec.Sukodono	Supporter	Terimplementasi
Akademisi	KKN Uinsa & Unesa 2020	Konseptor	Terimplementasi
Komunitas	Ketua Koordinator Kampung	Akselelator	Terimplementasi
Masyarakat	Tanggung Dusun Cangkringan		
Media	Surat Kabar Radar Sidoarjo Konten Kreator Bangga Sidoarjo	Publikator	Terimplementasi

No	Elemen Terlibat	Hasil Kolaborasi
1	Pemerintah	. Mengeluarkan kebijakan melakukan dan pemahaman. . Memberikan pemberdayaan.
2	Bisnis	. Memberikan bantuan kepada masyarakat. . Mematuhi dan membantu merealisasikan kebijakan pemerintah
3	Akademisi	. Mentaati dan turut mendukung aturan yang dikeluarkan pemerintah. . Memberikan informasi dan pemahaman bersama ditengah masyarakat.
4	Masyarakat	. Mentaati dan turut mendukung aturan yang dikeluarkan pemerintah. . Memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah . Memberikan pemahaman bersama ditengah masyarakat.
5	Media	.. Mentaati dan turut mendukung aturan yang dikeluarkan pemerintah. . Memberikan informasi dan pemahaman bersama ditengah masyarakat.

Sumber: dari hasil penelitian

Program kampung tangguh ini berbasis komunitas warga dan melibatkan semua warga tanpa terkecuali dalam pelaksanaan program ini. Bahkan kampung tangguh yang berbasis *problem solving* di jadikan sebagai upaya pemecahan masalah di tengah terjadinya virus corona. Kampung tangguh bukan hanya tangguh untuk memerangi virus corona tapi juga tangguh dalam bidang ekonomi, keamanan dan kebutuhan pangan. Proses kolaborasi sudah terlihat dalam pelaksanaan program kampung tangguh. Setiap pemangku kepentingan berperan dan bekerjasama dalam mensukseskan tujuan dari kampung tangguh.

VI. KESIMPULAN

Kolaborasi dalam penanganan kasus Covid-19 sangat dibutuhkan dimulai dari komitmen yaitu berupa regulasi peraturan perundangan yang menjadi bahan dalam melangkah. Konsep *Collaborative Governance* dijadikan sebagai langkah alternatif dalam penanganan kasus Covid-19 yang diharapkan mampu mewujudkan percepatan dan implementasi dari penanganan Covid-19 yang melibatkan berbagai pihak (Rivelino & Ginting, 2020). *Collaborative Governance* pada dasarnya untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansell & Gash dalam Islamy, 2018) dan model kolaborasi yang paling ideal adalah kolaborasi model *pentahelix*, yang juga sesuai dengan arahan Dini purnawansyah selaku Ketua Kampung Tangguh Dusun Cangkringan. Salah satu dampak positif pengimplementasian kolaborasi model *pentahelix* dalam upaya penanganan wabah COVID-19 adalah adanya pelibatan berbagai unsur seperti komunitas masyarakat. Adanya komunitas masyarakat dapat menjadi akselelator dari tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena komunitas masyarakat dapat mempercepat penyampaian program terkait upaya penanganan wabah COVID-19, sehingga akan mampu membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah yang sedang terjadi, serta patuh pada dan turut serta menyukseskan program yang telah dikeluarkan pemerintah. Selaras dengan S Halibas dkk, (2017:162) yang memaparkan bahwa kolaborasi *pentahelix* mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan bersama.

Upaya paling tepat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin masif adalah dengan cara membentuk kesadaran kolektif antar stakeholder melalui program kampung Tangguh. Melalui

kampung Tangguh inilah seluruh masyarakat ikut terlibat karena adanya komitmen dari masyarakat dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 sangat dibutuhkan. Kebijakan sebaik apapun akan sia-sia jika tidak ada komitmen dari masyarakat. Untuk itu bekerjasama antara stakeholder dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 melalui program ini merupakan solusi terbaik karena dalam program Kampung Tangguh ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk saling mengingatkan untuk menjauhi kerumunan dan selalu menjaga jarak, serta mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menonjol pada aspek ketangguhan desa, yaitu desa mampu menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan dan bekerja sama untuk dapat menekan angka penyebaran Virus COVID-19. Upaya masyarakat Dusun Cangkringan dan Pemerintahan Desa di dalam kampung tangguh adalah dengan cara memanfaatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat serta penyediaan handsanitizer dan menyediakan alat cuci tangan dan lain lain untuk dapat membantu keberhasilan pemerintah desa dan masyarakat dalam menekan angka penyebaran Virus COVID-19.

Desa yang dijadikan sebagai benteng pertahanan terakhir harus memiliki upaya dalam memitigasi bencana. Melalui program Kampung Tangguh inilah salah satu wujud dari upaya sebagai benteng pertahanan dalam melakukan mitigasi terhadap penyebaran COVID-19 yang dilakukan mulai dari lingkup terkecil yaitu dari desa dan warga sekitar. Dalam aspek ini juga sangat berhubungan dengan entitas sosial. Oleh karena itu ketangguhan desa sebagai bentuk pertahanan terakhir sangat menentukan bagaimana sebuah kebijakan mampu terealisasi dengan baik. Ketangguhan sosial yang mampu memanfaatkan keberagaman sosial guna saling menompang dan membangun solidaritas antar masyarakat desa. Eksistensi dari entitas sosial terhadap ketangguhan suatu desa akan diuji jika lingkungan tersebut menunjukkan perubahan yang cukup signifikan serta berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Dalam pandemi COVID-19, banyak masyarakat Indonesia mengalami defisit kreatifitas atau inovasi keberagaman sosial. Pandemi ini juga telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagaimana sistem sosial bangsa Indonesia mampu bekerja, baik mulai dari ranah politik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan terlibat dalam penyelesaian penulisan ini, Keluarga serta PemKab. Sidoarjo, PemDes Cangkringsari dan Masyarakat Dusun Cangkringan.

REFERENSI

1. Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4): 543–71.
2. De Seve, G Edward. 2007. *The Business of Government*. IBM Center for The Business of Government.
3. B.D., Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. Penang, Malaysia: CGIAR Research Program on Auatic Agricultural System.
4. Nogi S., Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.
5. Thomson, Ann Marie, and James L Perry. 2006. "Collaboration Processes: Inside the Black Box." *Public Administration Review* 66(01): 20–32.
6. Amin, Raja Muhammad, Rury Febrina, and Baskoro Wicaksono. 2021. "Handling COVID-19 from a Collaborative Governance Perspective in Pekanbaru City." *Jurnal Bina Praja* 13(01): 1–13.
7. Haryono, N. 2012. "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik." *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 01.
8. Fikky Ardiansyah, Galih Wahyu Pradana (2021) *Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Upaya Penanganan Bencana Wabah Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro*. Publika. Volume 9 Nomor 4 Tahun 2021, 545-560
9. Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, Moh. Imron (2017) *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaain Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas*. Sosiohumaniora, Volume 19 No 1 Maret 2017 : 1 - 7
10. Rangi Ade Febrian (2016) *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Vol 11 Nomor 1 Oktober 2016.
11. Sugi Rahayu, Utami Dewi (2015) *Collaborative Governance Dalam Pembudayaan Etika Berlaku-Lintas Pelajar SMA di Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta
12. Roberth Akbar, Bambang Supriyono, Tjahjanulin Domai (2022). *Collaborative Governance*

Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. Vol. 8 No 2 (2022)

13. Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2014), Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga

14. Pusparani, Rianto (2021) Impelementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuntu. Vol 4, No 1 (2021)

15. Agranoff, Robert & Michael McGuire, 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governance*. Washington DC: GeorgetownUniversity Press.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.